

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Sesudah Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Kedua

_____. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer

Bangun, Zakaria. 2020. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 Konstitusi dan Babakan Konstitusi Indonesia*. Bandung: Yrama Widya

Dimiyati Hartono. 2013. *Problematic Dan Solusi Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum, Penelitian Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta

Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2019. *14 Tahun Kiprah Menuju Komisi Yudisial Kredibel Dan Unggul*. Jakarta: Setjen Komisi Yudisial RI

Moleong, Lexi. J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya

Palguna, I Dewa Gede. 2018. *Mahkamah Konstitusi, Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2004. *Buku Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif / Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali Press

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wajdi, Farid Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin. 2020. *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*. Jakarta: Sinar Grafika

Wibowo, Mardian. 2019. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konsititusi: Konsep Dan Kebijakan Dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers

Yaqin, Arief Ainul. 2018. *Constitutional Question. Kewenangan yang Terlupakan dan Gagasan untuk Melembagakannya di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal:

Alexander, Yoshua, Nurhidayatulloh, et all. 2019. Kedudukan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan Dalam Struktur Ketatanegaraan RI. *Jurnal Simbur Cahaya*. Vol. 26. No.1

Amalia, Riska Ari, Gatot Dwi Hendro Wibowo, et all. 2019. Konflik Asas Ius Curia Novit Dengan Asas Nemo Judex In Causa Sua Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *Jurnal Education and Development*. Vol.7. No.3

Angkouw, Kevin. 2014. Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*. Vol.11. No.2

Arif, Achmad dan Affrizal Berryl Dewantara. 2019. Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi No. 005/PUU-IV/2006 Berdasarkan Asas Nemo judex idoneus in propia causa Dan Prinsip Istiglal Qadha. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 13. No.2

Arifin, Firmansyah. 2007. Revisi UU Komisi Yudisial Urgensinya Dalam Proses Reformasi Peradilan. *Jurnal Hukum Prioris*. Vol. 1. No.2

Aryanto, Jesi. 2012. Pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial. *Jurnal ADIL: Jurnal Hukum*. Vol.3. No.2

- Bertin. 2013. Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Perilaku Hakim Dihubungkan Dengan Independensi Hakim Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Ed.3 Vol.1
- Busthami, Dachran. 2017. Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 46. No.4
- Erniyanti. 2015. Eksistensi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol.10. No.2
- Kalalo, Dewi Margareth. 2014. Eksistensi Komisi Yudisial Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hakim. *Jurnal Lex Crimen*. Vol.III. No.1
- Machmudin, Dudu Duswara. 2013. Mengembalikan Kewibawaan Mahkamah Agung Sebagai Peradilan Yang Agung. *Jurnal Konstitusi*. Vol.10 No.1
- Maladi, Yanis. 2010. Benturan Asas Nemo iudex in propria causa dan Asas Ius Curia Novit Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No.2
- Muhtadi. 2015. Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.9. No.3
- Rubaie, Ach, Nyoman Nurjaya, et. all. 2014. Putusan Ultra petita Mahkamah Konsitusi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 11. No.1
- Sa'adah, Nabitus. 2019. Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 2 Issue 2
- Sasmito, Hery Abduh. 2011. Putusan Ultra petita Mahkamah Konsitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Suatu Perspektif Hukum Progresif). *Jurnal Law Reform*. Vol.6. No.2
- Sumadi, Ahmad Fadlil. 2012. Pengawasan dan Pembinaan Mahkamah Agung Terhadap Pengadilan Di Bawahnya. *Jurnal Media Hukum*. Vol.19 No.1

Suparto. 2017. Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-47. No.4

_____.2019. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. *Paguruyan Law Journal*. Vol.2. No.2

Windrawan, Puguh. 2014. Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Keberadaan Lembaga Negara Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konsitusi: Nomor 005/PUU-IV/2006; Nomor 006/PUU-IV/2006 dan Nomor 030/SKLN-IV/2006. *Jurnal Yudisial*. Vol.7. No.1

Wiriadinata, Wahyu. 2013. Komisi Yudisial Dan Pengawasan Hakim Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-44 No.4

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Putusan No. 005/PUU-IV/2006

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Internet:

Detik News. 2005. *KY: Tolak Panggilan, Bagir Intoleran*. <https://news.detik.com/berita/d-501957/ky-tolak-panggilan-bagir-intoleran> diakses pada Jumat, 8 Januari 2021

Isra, Saldi. 2010. Putusan Mahkamah Konstitusi No 005/PUU-IV/2006 (Isi, Implikasi, dan Masa Depan Komisi Yudisial). <https://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/422-putusan-mahkamah-konstitusi-no-005puu-iv2006-isi-implikasi-dan-masa-depan-komisi-yudisial.html> diakses pada Minggu, 10 Januari 2021

Sorik, Sultan. Perdebatan Lembaga Pengawas Hakim Konstitusi: Antara Tirani Yudisial dan Kehormatan Mahkamah Konstitusi. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1250-perdebatan-lembaga-pengawas-hakim-konstitusi-antara-tirani-yudisial-dan-kehormatan-mahkamah-konstitusi#:~:text=Dewan%20Etik%20bersifat%20tetap%2C%20berkantor,yang%20dilakukan%20oleh%20Hakim%20Konstitus> diakses pada Kamis, 21 Januari 2021